



SALINAN

## WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam Tahun Anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2003 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4264);

3. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286 );
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan kedua atas undang-undang nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049

10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416 ) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan *Bantuan Sosial* Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012;
20. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan Tahun 2011 Nomor 116);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN

dan

WALIKOTA KOTA TIDORE KEPULAUAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 494,944,636,000,00 mengalami penambahan sebesar Rp. 48,978,439,577,54 Sehingga setelah perubahan menjadi Rp. 543,923,075,577,54 dengan rincian sebagai berikut:

- |                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Pendapatan              |                             |
| a. Semula                  | Rp 491,824,636,000,00       |
| b. Bertambah / (Berkurang) | <u>Rp 12,423,697,000,00</u> |

Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp	504,248,333,000,00
2. Belanja		
a. Semula	Rp	494,944,636,000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>48,978,439,577,54</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	543,923,075,577,54
Surplus/ (Defisit) setelah perubahan	Rp	(39,674,742,577,54)
3. Pembiayaan Daerah :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	6,120,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp.	<u>36,554,742,577,54</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp.	42,674,742,577,54
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	3,000,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	3,000,000,000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan	Rp	39,674,742,577,54
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan	Rp	0.00

## Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah		
1. Semula	Rp	8,500,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	8,500,000,000,00
b. Dana Perimbangan		
1. Semula	Rp	469,537,136,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah dana perimbangan setelah Perubahan	Rp	469,537,136,000,00

c. Lain - Lain Pendapatan Daerah yang Sah	
1. Semula	Rp 13,787,500,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 12,423,697,000,00</u>
Jumlah lain-lain Pendapatan daerah yang sah setelah Perubahan	Rp 26,211,197,000,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Pajak Daerah	
1. Semula	Rp 2,561,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Pendapatan asli daerah setelah Perubahan	Rp 2,561,000,000,00
b. Retribusi Daerah	
1. Semula	Rp 3,358,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Retribusi daerah setelah Perubahan	Rp 3,358,000,000,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	
1. Semula	Rp 561,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp 561,000,000,00
d. Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang sah	
1. Semula	Rp 2,020,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp 2,020,000,000,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi Hasil Bukan Pajak	
1. Semula	Rp 26,520,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana bagi hasil setelah perubahan	Rp 26,520,000,000,00
b. Dana Alokasi Umum	
1. Semula	Rp. 399,531,966,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana alokasi umum setelah Perubahan	Rp. 399,531,966,000,00

c. Dana Alokasi Khusus	
1. Semula	Rp 43,485,170,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana alokasi khusus setelah Perubahan	Rp 43,485,170,000,00
(4) Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :	
a. Hibah	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah pendapatan hibah setelah Perubahan	Rp 0,00
b. Dana Darurat	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana darurat setelah Perubahan	Rp 0,00
c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi	
1. Semula	Rp 2,260,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi setelah Perubahan	Rp 2,260,000,000,00
d. Dana penyesuaian dan Otonomi Khusus	
1. Semula	Rp 11,527,500,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 12,423.697.000,00</u>
Jumlah dana penyesuaian dan otonomi khusus setelah Perubahan	Rp 23,951,197,000,00
e. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah	
1. Semula	Rp 0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan dari propinsi setelah perubahan	Rp 0,00

### Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :	
a. Belanja Tidak Langsung sejumlah	
1. Semula	Rp 259.037.389.717,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 13.677.801.659,54</u>
Jumlah belanja tidak langsung setelah Perubahan	Rp 272.715.191.376,54
b. Belanja Langsung sejumlah	
1. Semula	Rp 235,907,246,283,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp 35.300.637.918,00</u>

Jumlah belanja langsung  
setelah Perubahan

Rp 271.207.884.201,00

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah

1. Semula Rp 243,987,389,717,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 10.913.406.659,00

Jumlah belanja pegawai  
setelah Perubahan

Rp 254.900.796.376,00

b. Belanja bunga

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bunga  
setelah Perubahan

Rp 0,00

c. Belanja subsidi

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja subsidi  
setelah Perubahan

Rp 0,00

d. Belanja hibah

1. Semula Rp 6,300,000,000,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 1,764,395,000,00

Jumlah belanja hibah  
setelah Perubahan

Rp 8,064,395,000,00

e. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp 1,750,000,000,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bantuan sosial  
setelah Perubahan

Rp 1,750,000,000,00

f. Belanja bagi hasil

1. Semula Rp 0,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bagi hasil  
setelah Perubahan

Rp 0,00

g. Belanja bantuan keuangan kepada Desa/Kelurahan

1. Semula Rp 4,000,000,000,00

2. Bertambah / (Berkurang) Rp 0,00

Jumlah belanja bantuan keuangan

setelah Perubahan	Rp	4,000,000,000,00
h. Belanja tidak terduga sejumlah		
1. Semula	Rp	3,000,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>1,000,000,000,54</u>
Jumlah belanja tidak terduga setelah Perubahan	Rp	<u>4,000,000,000,54</u>
 (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	18,660,881,181,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>699,351,500,00</u>
Jumlah belanja pegawai setelah Perubahan	Rp	19,360,232,681,00
 b. Belanja Belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp	110,949,679,631,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>9.845,974,916,77</u>
Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan	Rp	120,795,654,547,77
 c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	106,296,685,471,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>24.755,311,501,23</u>
Jumlah belanja modal setelah Perubahan	Rp	131,051,996,972,23

#### Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan Pembiayaan		
1. Semula	Rp	6,120,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>36,554,742,577,54</u>
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	42,674,742,577,54
 b. Pengeluaran Pembiayaan		
1. Semula	Rp	3,000,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah Perubahan	Rp	3,000,000,000,00
 (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :		

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya		
1. Semula	Rp	6,120,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>36,554,742,577,54</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan	Rp	42,674,742,577,54
b. Pencairan dana cadangan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan kembali pemberian pinjaman setelah Perubahan	Rp	0,00
f. Penerimaan piutang daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan	Rp	0,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :		
a. Pembentukan dana cadangan		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah Perubahan	Rp	0,00
b. Penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah		
1. Semula	Rp	3,000,000,000,00
2. Bertambah / (Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah penyertaan modal (investasi) daerah		

setelah perubahan	Rp	3,000,000,000,00
c. Pembayaran pokok utang		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pembayaran pokok utang setelah Perubahan	Rp	0,00
d. Pemberian pinjaman daerah		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah / (Berkurang)	<u>Rp</u>	<u>0,00</u>
Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah Perubahan	Rp	0,00

#### Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, pendapatan, belanja, dan pembiayaan ;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah, dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan daerah ;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan jumlah pegawai per golongan dan per jabatan ;
7. Lampiran VII Daftar kegiatan - kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam Tahun Anggaran ini ;

#### Pasal 6

Walikota menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tidore Kepulauan.

Ditetapkan di Tidore  
pada tanggal, 19 September 2012

WALIKOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ACHMAD MAHIFA

Diundangkan di Tidore  
pada tanggal, 19 September 2012

SEKRETARIS DAERAH  
KOTA TIDORE KEPULAUAN,

ttd

ANSAR HUSEN

LEMBARAN DAERAH KOTA TIDORE KEPULAUAN TAHUN 2012 NOMOR 126

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM  
SETDA KOTA TIDORE KEPULAUAN,



Hj. BONITA SY MANGGIS, SH, M.Si  
PEMBINA TK. I

NIP. 19660110 199211 2 001